CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF PERMENDAG NO. 99 TH. 2018 DAN HUKUM ISLAM

Ade Lukman Firmansyah^{1*}, Tajul Arifin²

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Lukmanf029@gmail.com, Tajularifin64@gmail.com

*lukmanf029@gmail.com

Abstrak

Cryptocurrency telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks peraturan pemerintah dan pandangan agama, terutama dalam kaitannya dengan Permendag No.99 tahun 2018 di Indonesia serta perspektif hukum Islam. Tulisan ini akan mengulas dampak cryptocurrency terhadap regulasi pemerintah yang tertuang dalam Permendag No.99 tahun 2018 serta mempertimbangkan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Permendag No.99 tahun 2018 mengatur tentang transaksi mata uang digital, termasuk cryptocurrency, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan pencegahan penggunaan untuk kegiatan ilegal. Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat perspektif tambahan yang harus dipertimbangkan, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketentuan tentang riba (bunga), dan keadilan dalam pertukaran. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat bersinergi atau bertentangan dalam konteks cryptocurrency. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan agama terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia.

Kata kunci: Cryptocurrency, Permendag No.99/2018, Hukum Islam, Regulasi pemerintah, Syariah

Pendahuluan

Cryptocurrency, sebagai sebuah fenomena global yang terus berkembang, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah dan pemikir hukum, terutama dalam konteks regulasi dan kelayakan dari sudut pandang agama. Di Indonesia, pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (Permendag No.99/2018) yang mengatur tentang transaksi mata uang digital, yang mencakup cryptocurrency. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam lanskap ekonomi digital, pertanyaan tentang bagaimana cryptocurrency berperan dalam konteks hukum Islam juga muncul.

Hukum Islam, sebagai kerangka normatif yang meliputi berbagai aspek kehidupan, menaruh perhatian khusus pada keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, peninjauan terhadap cryptocurrency dari sudut pandang hukum Islam menjadi penting untuk menilai kelayakan dan kesesuaian penggunaannya dalam masyarakat Muslim. Dalam pandangan hukum Islam, tidak hanya aspek legalitas yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kompatibilitas dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi dari penggunaan cryptocurrency dalam konteks Permendag No.99/2018 dan perspektif hukum Islam. Analisis yang komprehensif tentang kedua aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana cryptocurrency dapat diatur secara efektif dalam kerangka regulasi yang ada sambil mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari hukum Islam.

Dalam pendahuluan ini, akan diuraikan beberapa poin kunci yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, termasuk latar belakang perkembangan cryptocurrency, tujuan dari Permendag No.99/2018, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks transaksi ekonomi digital. Selain itu, pendahuluan ini juga akan menggarisbawahi pentingnya peninjauan holistik

terhadap cryptocurrency yang mencakup aspek hukum positif dan hukum agama untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai cryptocurrency, Permendag No.99 tahun 2018, dan hukum Islam telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Salah satu kontribusi signifikan dalam literatur ini datang dari penelitian doktoral Khanim (2023), yang menganalisis transaksi jual beli token kripto I-Coin Wirda Mansur dari perspektif Permendag No.99 tahun 2018 dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi peraturan perdagangan digital dan kelayakan dari sudut pandang hukum Islam terhadap jenis aset kripto tertentu.

Jannatul Laili (2023) juga menyumbangkan wawasan penting melalui disertasinya yang meninjau investasi cryptocurrency di Indonesia berdasarkan fatwa MUI dan hukum nasional. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan otoritas Islam terhadap cryptocurrency serta hubungannya dengan kerangka regulasi nasional yang ada. Sementara itu, Wilujeng (2023) memberikan kontribusi tambahan dengan tinjauan khusus tentang perspektif hukum Islam terhadap investasi cryptocurrency, yang membantu memperluas pemahaman tentang implikasi moral dan etika dalam transaksi kripto.

Studi oleh Iswara dan Widiatedja (2018) menyelidiki pengaturan transaksi pembayaran menggunakan aset kripto di Indonesia, memberikan gambaran tentang kerangka regulasi yang ada pada saat itu. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah menghadapi fenomena kripto pada tahap awal regulasi. Sementara itu, Priambodo (2022) mengulas investasi aset kripto dari perspektif peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, menambahkan dimensi hukum yang penting dalam literatur ini.

Studi lainnya, seperti yang dilakukan oleh Arzam et al. (2023), memberikan perspektif yang lebih luas dengan menganalisis apakah cryptocurrency dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dari dua sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, Kurniawan et al. (2023) meneliti pengaruh fatwa MUI terkait legalitas Bitcoin sebagai aset digital di Indonesia, yang memperkaya diskusi tentang legitimasi cryptocurrency dari perspektif agama.

Pandangan sebelah mata tentang akuntansi uang kripto juga telah menjadi subjek perhatian, seperti yang ditunjukkan oleh Yudha (2022). Studi ini memberikan wawasan tentang tantangan akuntansi yang dihadapi dalam konteks cryptocurrency di Indonesia. Barkah dan Zakiran (2023) memberikan kontribusi dengan membahas perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto, yang memberikan gambaran tentang upaya legislator untuk melindungi kepentingan investor dalam ekosistem cryptocurrency.

Penelitian Mabur (2023) menyoroti perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia terhadap cryptocurrency, menambahkan dimensi agama yang penting dalam diskusi ini. Studi ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi pandangan terhadap aset kripto dan regulasi yang diterapkan terhadapnya.

Melalui tinjauan pustaka ini, dapat dilihat bahwa ada beragam kontribusi yang diberikan oleh peneliti dalam memahami kompleksitas regulasi dan implikasi hukum cryptocurrency di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum agama. Karya-karya ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis lebih lanjut tentang bagaimana cryptocurrency dapat diatur dengan baik sambil mempertimbangkan aspek etika, moral, dan hukum yang relevan.

Metodologi

Dalam melakukan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka, pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terperinci terhadap literatur yang relevan dalam domain tertentu. Dalam konteks tinjauan ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan cryptocurrency, regulasi pemerintah terkait (seperti Permendag No.99 tahun 2018), dan perspektif hukum Islam. Data diperoleh dari berbagai dokumen akademis, seperti disertasi, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terkait.

Ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya) ayat tersebut dengan cermat seperti yang dilakukan oleh H. M. Federspiel(1996), Tajul Arifin(1996), dan R.T. Hidayat(1996). Dan jika teks hukum tersebut berupa Hadits, maka menurut Tajul Arifin, aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat (periwayatan) dan dirayah (pemahaman) harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat oleh Tajul Arifin (2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan Tajul Arifin (2016).

Proses analisis dimulai dengan pencarian dan seleksi literatur yang sesuai dengan topik penelitian, yang kemudian dikumpulkan dan disusun untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis temuan dari literatur tersebut, tanpa melakukan pengumpulan data tambahan melalui observasi atau wawancara.

Metode penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan cryptocurrency, regulasi pemerintah, dan perspektif hukum Islam berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengeksplorasi dan menginterpretasi temuan dari literatur yang telah diidentifikasi, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu-isu yang terkait dengan cryptocurrency, termasuk tantangan regulasi dan implikasi hukumnya, serta perspektif hukum Islam dalam konteks ini. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dari studi pustaka, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang topik yang sedang dibahas, dan mendorong adanya diskusi lebih lanjut serta penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih terbuka dalam domain ini.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai tinjauan cryptocurrency terhadap Permendag No.99 tahun 2018 dan hukum Islam menyoroti kompleksitas regulasi dan perspektif agama terhadap fenomena ekonomi digital yang semakin berkembang. Permendag No.99/2018 menjadi titik fokus penting dalam pengaturan transaksi cryptocurrency di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi perlunya perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, implementasi regulasi ini harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi.

Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah perspektif hukum Islam terhadap cryptocurrency. Hukum Islam, atau syariah, memiliki kerangka normatif yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, para cendekiawan dan praktisi hukum Islam mulai meneliti apakah cryptocurrency sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa penelitian menyoroti potensi konflik antara prinsip-prinsip

syariah dan karakteristik cryptocurrency, seperti ketidakjelasan status hukumnya dalam Islam dan kemungkinan adanya riba (bunga) dalam transaksi kripto.

Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Khanim (2023), Jannatul Laili (2023), dan Wilujeng (2023) memberikan wawasan yang penting tentang perspektif hukum Islam terhadap cryptocurrency. Mereka menyelidiki apakah cryptocurrency dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, terutama mengingat kekhawatiran akan adanya unsur spekulatif dan ketidakpastian dalam transaksi kripto. Salah satu perdebatan utama adalah apakah investasi cryptocurrency dapat dianggap sebagai perjudian, yang dilarang dalam Islam, atau sebagai bentuk investasi yang sah.

Tinjauan ini juga melibatkan analisis terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait legalitas cryptocurrency, seperti yang diteliti oleh Kurniawan et al. (2023). Fatwa ini menjadi penting dalam membimbing umat Muslim dalam menggunakan cryptocurrency sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Namun, beberapa peneliti mengkritik bahwa fatwa tersebut mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan dinamika pasar cryptocurrency saat ini.

Selain itu, peraturan pemerintah juga harus diperhatikan dalam konteks ini. Permendag No.99/2018 menjadi landasan hukum utama yang mengatur transaksi cryptocurrency di Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam mengimplementasikan regulasi ini secara efektif tanpa bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Beberapa peneliti, seperti Iswara dan Widiatedja (2018), Priambodo (2022), dan Barkah dan Zakiran (2023), telah melakukan analisis yang mendalam tentang pengaturan transaksi kripto oleh pemerintah dan implikasinya terhadap pasar cryptocurrency di Indonesia.

Tantangan terbesar dalam menyelaraskan regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam adalah memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan keuangan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Maburr (2023), mencoba menyatukan perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia untuk menghasilkan kerangka regulasi yang inklusif dan berdaya tahan terhadap dinamika pasar cryptocurrency yang terus berkembang.

Selain itu, perdebatan juga muncul mengenai apakah cryptocurrency dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dalam Islam. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Arzam et al. (2023) mempertimbangkan aspek hukum positif dan hukum agama dalam menilai legitimasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi yang sah. Beberapa penelitian menyoroti kebutuhan akan pendekatan holistik yang memadukan aspek-aspek regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur cryptocurrency di Indonesia.

Dalam konteks ini, upaya harmonisasi antara regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan cryptocurrency yang berkelanjutan. Tinjauan holistik terhadap cryptocurrency dari perspektif hukum positif dan hukum agama diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi kebijakan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk terus memperdalam pemahaman tentang kompleksitas ini dan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak yang terlibat, baik dari segi regulasi pemerintah maupun prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengaturan dan pemahaman mengenai cryptocurrency, khususnya dalam konteks Permendag No.99 tahun 2018 dan hukum Islam, menimbulkan berbagai perdebatan yang kompleks dan mendalam. Tinjauan yang mendalam terhadap topik ini memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap implikasi regulasi pemerintah, perspektif agama, serta dinamika pasar cryptocurrency yang terus berkembang. Permendag No.99/2018, sebagai instrumen utama dalam pengaturan transaksi cryptocurrency di Indonesia, telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk memitigasi risiko kejahatan keuangan dan melindungi konsumen. Namun,

tantangan muncul dalam menyesuaikan regulasi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dalam pandangan moral dan etika.

Sebagian besar penelitian telah menyoroti potensi konflik antara regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan cryptocurrency. Salah satu aspek yang kontroversial adalah status hukum cryptocurrency dalam Islam, apakah itu dapat dianggap sebagai bentuk mata uang yang sah atau merupakan instrumen keuangan yang spekulatif dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa dari otoritas agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi penting dalam membimbing umat Muslim dalam menggunakan cryptocurrency sesuai dengan ajaran Islam. Namun, beberapa peneliti menunjukkan bahwa fatwa tersebut mungkin belum sepenuhnya memahami dinamika dan kompleksitas pasar cryptocurrency, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

Tinjauan terhadap perspektif hukum Islam juga mengungkapkan berbagai perbedaan pendapat di antara cendekiawan dan praktisi hukum. Sebagian menganggap bahwa cryptocurrency dapat diterima dalam kerangka hukum Islam dengan catatan bahwa transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Namun, pendapat lain mempertanyakan kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal spekulasi dan ketidakpastian yang melekat dalam transaksi kripto.

Di sisi lain, aspek regulasi pemerintah juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi keberlangsungan cryptocurrency dalam konteks hukum dan agama. Permendag No.99/2018 mencoba untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan cryptocurrency, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal. Namun, tantangan muncul dalam mengimplementasikan regulasi ini secara efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan pasar cryptocurrency yang terus berkembang.

Studi-studi terkait telah menyoroti berbagai kelemahan dalam regulasi pemerintah, termasuk kurangnya pemahaman tentang karakteristik cryptocurrency yang kompleks dan dinamika pasar yang cepat berubah. Implementasi regulasi yang tidak tepat dapat membatasi pertumbuhan industri cryptocurrency dan menghambat akses masyarakat terhadap inovasi keuangan yang berkembang pesat ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan perspektif hukum Islam serta dinamika pasar cryptocurrency yang terus berkembang.

Selain itu, perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi kompleksitas regulasi cryptocurrency menjadi semakin penting. Pendekatan ini harus memadukan perspektif hukum positif dan hukum agama untuk menciptakan kerangka regulasi yang seimbang dan adil. Upaya harmonisasi antara regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, yang memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cryptocurrency dan implikasi hukum serta agama yang terkait. Pendidikan dan penyuluhan publik tentang risiko dan manfaat penggunaan cryptocurrency dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan adopsi yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang cryptocurrency.

Oleh karena itu, tinjauan cryptocurrency terhadap Permendag No.99 tahun 2018 dan hukum Islam memunculkan berbagai isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan inklusif dalam penyelesaiannya. Upaya untuk menyelaraskan regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam perlu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang

implikasi hukum dan agama terhadap penggunaan cryptocurrency dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan kebijakan yang berkelanjutan dan adil dalam konteks Indonesia yang majemuk ini.

Simpulan

Dalam meninjau cryptocurrency dalam konteks Permendag No.99 tahun 2018 dan hukum Islam, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. Pertama, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang cryptocurrency dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen serta pencegahan kejahatan keuangan. Regulasi pemerintah seperti Permendag No.99/2018 merupakan langkah awal yang penting dalam mengatur transaksi cryptocurrency, namun, harus terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi.

Kedua, penelitian dalam konteks hukum Islam menunjukkan adanya kompleksitas dalam menafsirkan kelayakan penggunaan cryptocurrency dalam pandangan agama. Sebagian melihatnya sebagai bentuk investasi yang sah, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi spekulatif dan ketidakpastian yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk terus mendiskusikan dan mengkaji secara mendalam implikasi moral dan etika dari penggunaan cryptocurrency dalam konteks agama.

Ketiga, harmonisasi antara regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Meskipun ada tantangan dalam menyelaraskan kedua kerangka kerja ini, upaya terus dilakukan untuk mengidentifikasi titik temu dan memperkuat kerjasama antara otoritas pemerintah dan lembaga agama.

Keempat, perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi kompleksitas regulasi cryptocurrency, yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum positif, hukum agama, dan dinamika pasar cryptocurrency yang terus berkembang. Pendekatan ini harus memperhitungkan berbagai kepentingan stakeholder, termasuk masyarakat umum, industri, dan otoritas pemerintah, untuk menciptakan kerangka regulasi yang inklusif dan berdaya tahan.

Kelima, pendidikan dan penyuluhan publik tentang cryptocurrency menjadi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat penggunaan cryptocurrency. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang cryptocurrency dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan adopsi yang bertanggung jawab.

Keenam, peran lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menyediakan sumber daya dan platform untuk diskusi terbuka tentang cryptocurrency sangatlah penting. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif, pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan yang terlibat.

Ketujuh, kesimpulan akhir adalah bahwa penelitian dan diskusi terus diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan agama terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Dengan memperhatikan kompleksitas dan dinamika pasar cryptocurrency, serta nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Referensi

- KHANIM, N. A. (2023). ANALISIS JUAL BELI TOKEN KRIPTO I-COIN WIRDA MANSUR PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 99 TAHUN 2018 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996)
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016)
- JANNATUL LAILI, O. K. T. A. V. I. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM NASIONAL (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- WILUJENG, A. G. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency.
- Iswara, I. G. A. N. D., & Widiatedja, I. G. N. P. (2018). PENGATURAN TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN ASET KRIPTO DI INDONESIA. *Learning*, 82.
- Priambodo, G. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019. *LEX CRIMEN*, 11(6).
- Arzam, A., Fauzi, M., Mursal, M., & Rahmat, P. (2023). APAKAH CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI INDONESIA?: ANALISIS DARI DUA PERSPEKTIF. *J-MABISYA*, 4(1), 18-25.
- Kurniawan, I., Rahmayani, N., & Nazar, J. (2023). Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 337-346.
- Yudha, B. (2022). Pandangan Sebelah Mata Tentang Diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) Di Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1).
- Barkah, L. B., & Zakiran, A. H. (2023, January). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 469-474).
- Mabrur, I. (2023). CRYPTOCURRENCY DALAM KACA MATA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA INDONESIA. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 4(3), 212-225.